

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan perekonomian di Indonesia semakin pesat seiring laju perubahan zaman ke arah era globalisasi. Hal ini mengakibatkan munculnya perusahaan-perusahaan baik yang berskala besar maupun yang berskala kecil dan meningkatkan pula laju persaingan perusahaan-perusahaan tersebut menjadi semakin ketat khususnya persaingan untuk menghasilkan pendapatan yang optimal. Perusahaan-perusahaan yang bersaing pun bukan hanya perusahaan yang bergerak di bidang jasa saja tetapi juga perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan industri.

Di tengah persaingan ketat antar perusahaan yang berorientasi pada penghasilan yang optimal dan bahkan laba yang besar, Indonesia memiliki bentuk usaha yang menjadi ciri khas perekonomian di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah Indonesia mengatur bentuk usaha tersebut yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan yang mengutamakan kemakmuran masyarakat dan sesuai dengan pasal tersebut bentuk usahanya ialah koperasi.

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2012 Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang

memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi mempunyai peranan penting dalam membantu masyarakat terutama masyarakat golongan menengah ke bawah. Nilai-nilai dasar seperti kekeluargaan, kesetiakawanan (solidaritas), keadilan, gotong royong, demokrasi, dan kebersamaan dapat dijadikan sebagai faktor kekuatan koperasi dalam keberadaannya di tengah masyarakat. Koperasi juga merupakan wadah demokrasi ekonomi milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola.

Agar tujuan nasional dapat tercapai dan koperasi dapat bersaing dengan badan usaha lainnya, maka koperasi perlu juga dikembangkan dalam bidang sektor-sektor lainnya seperti industri, perdagangan, angkutan, dan lain-lain. Usaha tersebut harus disertai dengan pembinaan agar peranan koperasi meningkat bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat semakin besar, dan laba yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut makin dinikmati dan bermfaat bagi anggotanya. Saat ini koperasi dituntut untuk mewujudkan koperasi yang dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya, baik oleh anggota pada khususnya masyarakat luas pada umumnya. Salah satu bentuk transparansi yang harus dilakukan koperasi adalah dengan cara menyusun dan menerbitkan laporan keuangan organisasinya.

Koperasi wajib memberikan informasi pada setiap anggotanya mengenai laporan keuangan koperasi yang dibukukan dalam buku laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi yang dibagikan kepada setiap anggota

koperasi pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Laporan keuangan koperasi dapat memberikan informasi mengenai perkembangan atau kemunduran koperasi. Dalam laporan keuangan koperasi tercatat semua transaksi yang terjadi pada koperasi selama satu periode, sehingga pemakai dapat mengetahui manfaat yang diperoleh sebagai anggota koperasi selama satu periode dengan SHU yang diperoleh, sumber daya ekonomi yang dimiliki, dan dapat diketahui pula kewajiban dan kekayaan bersihnya.

Proses dalam penyusunan laporan keuangan, profesi akuntansi dihadapkan pada kemungkinan bahaya penyimpangan, dan ketidak tepatan. Untuk meminimumkan bahaya ini, profesi akuntansi mengesahkan seperangkat standar dan prosedur umum yang disebut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Di Indonesia prinsip akuntansi ini, disusun dalam standar akuntansi keuangan (SAK). Standar akuntansi adalah pedoman pokok penyusunan dalam penyajian laporan keuangan yang harus di pedomani oleh setiap perusahaan dalam penyusunan laporan keuangannya. Sama halnya dengan organisasi lain, salah satu bentuk transparansi yang harus dilakukan koperasi adalah dengan cara menyusun dan menerbitkan laporan keuangan organisasi dengan mengikuti standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Semua kegiatan dan laporan keuangan berupa dana-dana yang dikeluarkan maupun dana masuk dirangkum dalam Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi setiap tahunnya.

Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi sangat penting untuk menginformasikan laporan keuangan berupa posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah pengguna dalam

pengambilan keputusan. Dalam penyajian laporan keuangan koperasi harus menganut SAK ETAP yang diputuskan berdasarkan peraturan menteri yang baru Nomor 12/PER/M.KUKM/IX/2015. Berdasarkan peraturan menteri tersebut, koperasi yang wajib menggunakan SAK ETAP adalah koperasi yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan merupakan koperasi sektor riil.

Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI) sebagai solusi bagi perusahaan menengah dan kecil yang sering menemukan kesulitan dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang selama ini berlaku. Perusahaan kecil dan menengah dapat memilih untuk menggunakan standar akuntansi yang akan mereka gunakan selama memenuhi syarat sebagai entitas yang diperbolehkan menggunakan SAK-ETAP dan dijalankan secara konsisten. Selain perusahaan kecil dan menengah, ada beberapa perusahaan lain yang menggunakan SAK-ETAP sebagai standar akuntansinya berdasarkan peraturan pemerintah bersama IAI. Salah satu entitas tersebut ialah koperasi.

Pelaporan keuangan koperasi sebaiknya disusun berdasarkan SAK-ETAP dan menggunakan metode *accrual basis*. Metode *Accrual basis* adalah penyandingan pendapatan dan biaya pada periode disaat terjadinya, bukan pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan (*cash basis*). Metode *Cash basis* berarti hanya mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi kas, *accrual basis* selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat hutang dan piutang organisasi. Oleh karena itu,

metode *accrual basis* memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan organisasi daripada metode *cash basis*.

Kehadiran SAK-ETAP diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam menyajikan laporan keuangan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik. Tujuan dari SAK-ETAP sendiri yakni untuk memberikan kemudahan bagi entitas skala kecil dan menengah (Sagala, 2014). SAK-ETAP sendiri dibuat untuk mengatasi segala keluhan penerapan PSAK umum pada entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK-ETAP bertujuan untuk mengakomodir segala kebutuhan entitas tanpa akuntabilitas publik dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut maka sudah seharusnya entitas tanpa akuntabilitas publik menerapkan SAK-ETAP dalam menyajikan laporan keuangannya. Salah satu komponen dari penyajian laporan keuangan yang mematuhi persyaratan SAK-ETAP yaitu kepatuhan terhadap SAK-ETAP. Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK-ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK-ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK-ETAP (IAI, 2016). Berdasarkan Penelitian Wahyuningsih (2014) kriteria dalam kepatuhan antara lain : pengakuan, pengukuran, pos-pos neraca, pos-pos perhitungan hasil usaha, pos-pos laporan perubahan ekuitas, dan pos-pos laporan arus kas.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tri Wahyuningsih (2014) menunjukkan bahwa hasil terhadap uji kepatuhan laporan keuangan KPRI Warga Jaya berdasarkan SAK-ETAP terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan

penyusutan yang secara langsung dipersetahunkan tidak dari tanggal perolehan, tidak dicatatnya akun kerugian aset pada laporan laba rugi, dan tidak adanya laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Silvia Meireny (2015) menunjukkan bahwa pada proses pelaksanaan siklus akuntansi yang ada, Koperasi Pasar Gondanglegi tidak melakukan pencatatan atas pencatatan transaksi dalam buku jurnal (*journal entry*) dan pencatatan ayat jurnal ke buku besar (*posting ledger*) yang sesuai dengan SAK-ETAP dan siklus akuntansi secara umum. Koperasi hanya melakukan tahap pengikhtisaran yaitu neraca saldo serta laporan keuangan. Pada penerapan penyusunan laporan keuangan yang dibuat Koperasi Pasar Gondanglegi tahun 2014 belum sesuai dengan SAK-ETAP karena hanya membuat penyajian laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi.

Adapun Penelitian yang dilakukan oleh Nia Yuniarsih (2016) menunjukkan bahwa laporan keuangan koperasi Sekar Melati IBI kota Surabaya mengenai kelengkapan komponen, pengukuran, pengakuan, dan identifikasi setiap pos masih belum memenuhi kriteria kepatuhan sesuai SAK-ETAP. Laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan tidak disusun oleh pengurus koperasi Sekar Melsti IBI Surabaya.

Penelitian lain yang juga dilakukan oleh Elsa Meandaspa (2018) menunjukkan bahwa penyajian laporan yang disajikan oleh Dharma Karya Palembang pada dasarnya telah sesuai dengan SAK-ETAP. Hanya saja pada laporan keuangan Dharma Karya Palembang tidak dicantumkan secara detail pos-pos yang sudah ditentukan dalam SAK-ETAP. Hal ini menjadi kelemahan

pada laporan keuangan yang dibuat oleh pihak koperasi Dharma Karya Palembang.

Tut Wuri Handayani merupakan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Palembang, koperasi Tut Wuri Handayani termasuk ke dalam Koperasi Pensiunan Guru yang bentuk koperasinya primer kabupaten/kota bergerak dalam bidang simpan pinjam pengawas pendidikan dan kebudayaan. Dimana pendanaanya berasal dari modal sendiri dan modal luar, modal sendiri terdiri dari simpanan sukarela, simpanan pokok, simpanan wajib, dan cadangan modal. Sedangkan modal luar terdiri dari pokok pinjaman pihak ke-3. Adanya koperasi dapat menunjang ekonomi anggota koperasi sehingga anggota mendapatkan manfaat keberadaan koperasi karena mampu meningkatkan produktivitas usaha anggota dan pendapatannya.

Saat ini, meskipun pemerintah telah memberikan pedoman bagaimana cara pembuatan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 12/PER/M.KUKM/IX/2015 untuk koperasi tetapi pada kenyataannya masih banyak koperasi yang pelaporannya belum memadai karena sebagian besar masih menggunakan *cash basis* dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan SAK-ETAP. Koperasi harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP dengan menggunakan dasar akrual, kecuali dalam penyusunan Laporan Arus Kas. Pos pos yang digunakan dalam dasar akrual antara lain aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan (pendapatan) dan beban yang diakui sesuai dengan prinsip pengakuan (IAI,2016). Dalam pelaksanaan pencatatan keuangan yang dilakukan selama ini

KPRI Tut Wuri Handayani belum sepenuhnya sesuai dengan SAK-ETAP. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dan menyusunnya dalam bentuk laporan akhir yang berjudul **“Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Tut Wuri Handayani”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) pada KPRI Tut Wuri Handayani Palembang?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penyusunan laporan akhir ini, perlu dibatasi ruang lingkup pembahasannya sehingga penulisan laporan akhir ini dapat dilakukan secara lebih terarah dan dapat mencapai tujuan serta sesuai dengan permasalahan yang ada. Dari data yang di dapat, maka pembahasan dibatasi pada penyajian laporan keuangan KPRI Tut Wuri Handayani dengan indikator berdasarkan SAK-ETAP yaitu Kepatuhan terhadap SAK-ETAP pada tahun 2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan KPRI Tut Wuri Handayani Palembang berdasarkan SAK-ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti mengenai Analisis Penyajian laporan keuangan berdasarkan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada KPRI Tut Wuri Handayani Palembang.

2. Bagi Koperasi

untuk memberikan saran yang bermanfaat bagi KPRI Tut Wuri Handayani dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) sehingga laporan keuangannya bisa dipakai dan diterima oleh pihak eksternal.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya akuntansi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan perbandingan dengan penelitian sejenis yang berkaitan dengan Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) Pada KPRI Tut Wuri Handayani.